



DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN DI PROVINSI GORONTALO

Sugiyarto¹, Noegroho²

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Email : sugiyarto@gmail.com, noegrohonoegroho@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Krisis ekonomi global, perekonomian daerah Gorontalo

Latar Belakang : Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas terhadap kondisi ekonomi nasional pada tahun 2020 dan 2021. Perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih, kembali terdampak akibat perang Rusia-Ukraina yang mendorong perekonomian global masuk ke dalam jurang resesi.

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak krisis ekonomi global terhadap kondisi perekonomian regional Gorontalo.

Metode : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan secondary data analysis dan *indepth interview*. Penelitian menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh dari narasumber. Narasumber terpilih merupakan orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator perekonomian regional Gorontalo telah terdampak krisis ekonomi global, diantaranya pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi meningkat, angka ketimpangan kesejahteraan di atas rata-rata nasional, nilai tukar petani menurun, pemutusan hubungan kerja meningkat, investasi tidak berkembang, dan kapasitas fiskal regional Gorontalo mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Kesimpulan: Implikasi penelitian ini adalah perlunya terus mengoptimalkan peran pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal melalui belanja APBN dan APBD untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung UMKM. Kebijakan moneter untuk mendukung stabilitas moneter di regional Gorontalo.

ABSTRACT

Keywords:
a slump in the world economy, economy in regions Gorontalo

Background: The national economic landscape in 2020 and 2021 has been significantly impacted by the Covid-19 outbreak. The national economy, which has yet to fully recover, was once more impacted by the Russia-Ukraine war in February 2022, which caused a slump in the world economy. Economic operators must adequately predict the prevalence of global economic uncertainty. Due to the weak global economy, conditions in Java Island's major cities' economies have started to significantly worsen. as one of the effects of the global community's falling purchasing power. The effects of the global financial crisis will extend from major cities to other locales with comparatively closed economies. The effects of the world economic crisis

must also be fully considered. The impact of the global economic crisis also needs to be properly anticipated by the Regional Office of the Directorate General of Treasury in carrying out its role as Regional Chief Economist in the regions Gorontalo.

Purpose: *The purpose of this study was to ascertain how the global economic crisis affected the Gorontalo region's economy.*

Method: *This study uses in-depth interviews and descriptive qualitative research with secondary data analysis. The sources are chosen at random. Methods, techniques, and processes used in research entail more data and information gleaned from informants. Selected informants are professionals in their industries who are skilled and knowledgeable. The three stages of data processing techniques are data reduction, data display, and conclusion-making.*

Results: *The results of the study show that several indicators of the Gorontalo regional economy have been affected by the global economic crisis, including slowing economic growth, increasing inflation, welfare inequality above the national average, declining farmer exchange rates, increasing layoffs, investment not growing, and fiscal capacity Gorontalo region reached its lowest point in the last five years.*

Conclusion: *the implication of this research is the need to continue to optimize the role of the government and Bank Indonesia through fiscal and monetary policies. Fiscal policy through APBN and APBD spending to increase people's purchasing power and support UMKM. Monetary policy to support monetary stability in the Gorontalo region.*

PENDAHULUAN

Kondisi krisis ekonomi global masih terjadi di berbagai negara sebagai akibat belum pulihnya pasca penanggulangan pandemi Covid-19. Ditambah kondisi konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia telah mengganggu rantai pasok pangan dan energi dunia. Konflik geopolitik telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang mendorong lonjakan harga-harga komoditas global dan meningkatkan kenaikan laju inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social ([Pemerintah Republik Indonesia, 2004](#)). Memajukan kesejahteraan umum menjadi kata kunci tujuan bernegara tersebut. Meski tidak sepenuhnya mewakili, salah satu indikator kunci peningkatan kesejahteraan umum adalah pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional/daerah. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) merupakan salah satu institusi yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi regional.

Melalui peran sebagai treasurer, Kanwil DJPb mendorong belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Kanwil DJPb disamping menjalankan peran sebagai treasurer, juga memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah. Mulai tahun 2021, Kanwil DJPb mengambil tantangan baru sebagai *Regional Chief Economist (RCE)*. Chief economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi

perencanaan, pengawasan dan penyebaran informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi dalam regional tertentu

Kanwil DJPb yang berlokasi di setiap provinsi, diharapkan lebih memahami kondisi perekonomian regional, sektor-sektor unggulan dan potensi di daerah, serta dinamika regional yang terjadi. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai RCE, Kanwil DJPb dapat memotret berbagai peluang investasi yang lebih relevan dengan kondisi daerahnya, sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

Salah satu tugas yang perlu dilakukan mitigasi oleh Kanwil DJPb adalah berkaitan dengan dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian regional Gorontalo. Di sisi dampak kenaikan harga BBM juga masih terus dilakukan pemantauan agar tidak semakin memberatkan roda perekonomian di daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Peranan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.

Pada pelaksanaannya, dampak yang ditimbulkan kepada masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Interaksi dengan perdagangan internasional melalui ekspor dan impor barang dan jasa akan menjadi salah satu faktor penentu. Yang paling dominan adalah berkaitan dengan peningkatan inflasi karena dampak kenaikan BBM dan menurunnya ekspor dari Provinsi Gorontalo. Penurunan daya beli negara tujuan ekspor. Hal ini menyebabkan pedagang mengalami penjualan yang tidak menentu.

Hal ini tercermin dari beberapa indikator perekonomian regional Gorontalo seperti pertumbuhan ekonomi yang kembali mengalami tekanan serta laju inflasi yang juga tercatat mengalami peningkatan akibat dampak resesi global. Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Gorontalo serta semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk. Kondisi ini membutuhkan respon kebijakan yang tepat dari pemerintah. Sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, Kanwil DJPb diharapkan dapat berperan aktif sebagai Prime Mover pertumbuhan ekonomi regional.

Harapan agar pelaksanaan APBN dan APBD lebih cepat sampai ke masyarakat melalui berbagai program pembangunan menjadi upaya yang terus dilakukan. Lebih cepat APBN diserap, akan membantu berputarnya roda perekonomian di daerah dan diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk menjadi benteng ekonomi regional Gorontalo dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan secondary data analysis dan indepth interview. Narasumber dipilih secara selektif. Penelitian menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh dari responden. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

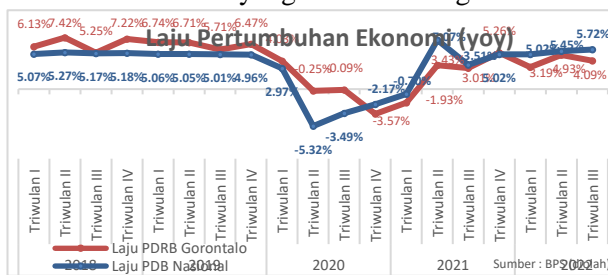
Narasumber terpilih merupakan orang yang kompeten yang ahli di bidangnya. Responden tersebut diantaranya, Ekonom Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo.

Terhadap narasumber dilakukan wawancara yang mendalam sesuai keahlian dan bidang tugasnya. Disamping itu, diperoleh data pendukung dari responden yang merupakan pimpinan Dinas / Instansi terkait, yang dapat digunakan sebagai data analisis. Sebagai tambahan data dukung, juga dilakukan pengumpulan bahan melalui literatur dari media on line sehingga penelitian menjadi lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang diperoleh guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Bahkan Holoway & Todres (2003) menyatakan bahwa thematic analysis ini merupakan dasar atau pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo yang kembali mengalami tekanan

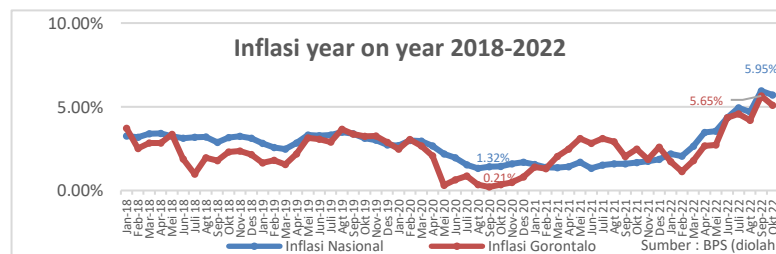


Grafik 1. Laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan Nasional
Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)

Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif menyampaikan bahwa sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Gorontalo cukup tinggi dan berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pandemi Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi Gorontalo sehingga mengalami kontraksi dan yang terdalam sebesar -3,57 % pada triwulan IV 2020. Ketika pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali dan kondisi makro ekonomi mulai pulih, krisis ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina kembali menekan pertumbuhan ekonomi Gorontalo sehingga mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pasca pandemi Covid-19 hingga triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tidak pernah lagi berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global juga mulai berdampak terhadap beberapa indikator lainnya seperti inflasi, perlambatan kinerja ekspor, perlambatan investasi, dan penurunan pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan III 2022 (y-o-y) jika dibandingkan dengan provinsi lain menempati posisi ke-5 dari enam provinsi di Pulau Sulawesi. Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Sulawesi Tengah (19,13 persen) dan terendah berada pada Sulawesi Barat (3,39 persen).

B. Inflasi Gorontalo yang meningkat



Grafik 2. Laju Inflasi Gorontalo dan Nasional
Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan keterangan Ekonom BI Gorontalo, Hendro Sirait sepanjang periode 2018-2022 (sd. Oktober 2022), laju inflasi di Gorontalo mengalami fluktuasi. Inflasi year on year tertinggi di Kota Gorontalo terjadi pada bulan September 2022, yaitu sebesar 5,65 persen. Sementara capaian inflasi year on year terendah terjadi pada bulan September

2020 sebesar 0,29 persen. Secara nasional, laju inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan September 2022 sebesar 5,95 persen dan terendah terjadi di bulan Agustus 2020 sebesar 1,32 persen. Perang Rusia-Ukraina mulai menimbulkan dampak terhadap laju inflasi global, termasuk di Gorontalo. Tercatat sejak bulan Juni 2022 laju inflasi (yoy) di Gorontalo meningkat dan berada di atas 3 persen dan puncaknya pernah mencapai 5,65%. (Pengukuran laju inflasi pada tahun 2018 sampai dengan 2019 masih menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100) sedangkan pengukuran laju inflasi pada tahun 2020 telah menggunakan tahun dasar baru 2018 (2018=100).

Akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia pada 3 September 2022 mengambil kebijakan pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Pengalihan subsidi BBM tersebut menyebabkan kenaikan harga BBM di tingkat eceran. Menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo atas usulan Organda menaikkan tarif angkutan umum. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa kenaikan tarif angkutan umum ini memberikan andil terbesar terhadap tingkat inflasi Gorontalo bulan Oktober 2022 sebesar 1,7 basis poin.

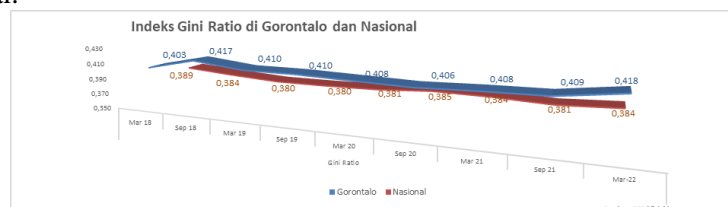
Ekonom Perwakilan BI Gorontalo, Hendro Sirait menyampaikan bahwa kenaikan tarif angkutan umum tersebut menyebabkan kenaikan biaya distribusi produk makanan dan minuman olahan. Selain itu, kenaikan harga BBM juga mendorong kenaikan biaya produksi dan packaging produk makanan dan minuman. Selanjutnya, kenaikan harga komoditas gandum dunia juga ikut mendorong kenaikan biaya produksi makanan. Keseluruhan hal tersebut menyebabkan kenaikan harga makanan dan minuman sehingga memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi di Gorontalo sebesar 1,659 basis poin.

Kenaikkan biaya transportasi dan harga harga makanan dan minuman menyebabkan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sebagaimana nampak pada tabel, pada TW II tahun 2022 pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,19, sementara pada TW III 2022 hanya mencapai 0,27. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi TW III 2022 Gorontalo secara agregat tetap naik namun mengalami perlambatan/melandai.

C. Angka Ketimpangan Kesejahteraan di Gorontalo di atas rata-rata nasional

Berdasarkan data BPS, nilai indeks Gini ratio Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,418. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan periode September 2021. Dibandingkan dengan Maret 2021 tren Gini ratio juga mengalami peningkatan.

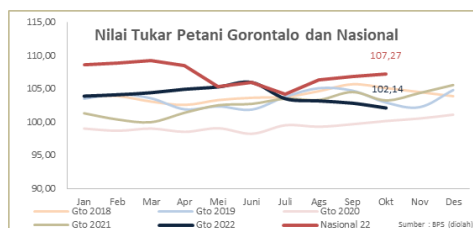
Komparasi antara tren Gini ratio di Gorontalo dan nasional juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Gorontalo selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Grafik Grafik 3. Indeks Gini Ratio Gorontalo
Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di regional Sulawesi, angka ketimpangan di Provinsi Gorontalo menempati urutan tertinggi diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka ketimpangan sebesar 0,387. Sementara itu, angka ketimpangan terendah di pulau Sulawesi terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 0,308 pada Maret 2022 (Tufa, 2018).

D. Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung menurun dan berada di bawah rata-rata nasional

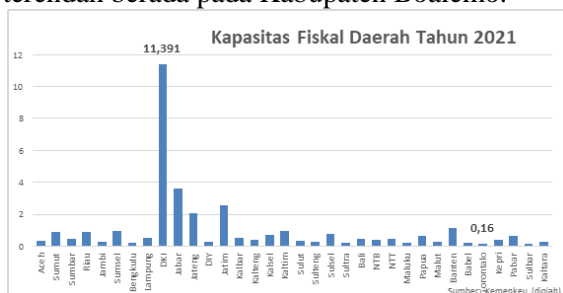


Grafik 4. Nilai Tukar Petani Gorontalo
Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)

Regional Economist Gorontalo menyampaikan bahwa kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo pada triwulan III tahun 2022 cenderung mengalami tren penurunan. Pada Bulan Oktober 2022, NTP di Provinsi Gorontalo mencapai 102,14 atau turun minus 0,70 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Secara umum selama 5 tahun terakhir, angka NTP Gorontalo masih berada di bawah NTP nasional. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan petani di Gorontalo masih berada di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan petani nasional.

E. Kapasitas Fiskal Daerah Gorontalo terendah di Indonesia selama 5 tahun terakhir

Dari sisi kapasitas fiskal daerah, sejak tahun 2017-2021 Provinsi Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terendah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut (kategori Sangat Rendah). Di tingkat kab/kota se Provinsi Gorontalo, pada tahun 2021 indeks Kapasitas Fiskal Daerah tertinggi berada pada Kota Gorontalo. Sementara indeks KFD terendah berada pada Kabupaten Boalemo.



Grafik 6. Kapasitas Fiskal Gorontalo
Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)

Besarnya kontribusi APBN terhadap APBD Gorontalo melalui dana transfer dan dana desa masih sangat dominan ([WIARTA TRILAKSANA, n.d.](#)). Diperlukan upaya lebih keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tujuan agar dapat digunakan menambah ruang belanja daerah yang terbatas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

F. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengalami kenaikan di tahun 2022

Tabel 1.

Ketenagakerjaan Gorontalo

Tahun	Penyebab Klaim			
	Usia Pensiun	Undur Diri	PHK	Berakhir Kontrak
2019	66	1.669	696	
2020	59	1.243	1.177	1
2021	160	1.055	91	1
2022	190	1.704	1.077	182
Total	475	5.671	3.860	184

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Arif Budiman menyampaikan data pengajuan klaim tenaga kerja periode 2019 s.d. 2022 berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebagaimana tabel di atas. Walaupun sulit untuk diidentifikasi, PHK terhadap tenaga kerja yang naik signifikan pada tahun 2020 dan 2021, kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19.

Pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan menandakan adanya pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan yaitu sebanyak 3.154 per 31 Oktober 2022 atau ada kenaikan sebesar 48,35%. Kondisi ini perlu diwaspadai agar tidak menjadi semakin memburuk di tahun 2023.

G. Investasi mengalami kondisi tidak berkembang

Tabel 2.
Investasi mengalami tidak berkembang

NAMA KABUPATEN	CAPAIAN PER TRIWULAN 2022			TOTAL	Persentase Capaian (%) sampai dengan TW3	Persentase Target (%)	Target Realisasi 2022
	I	II	III				
KABUPATEN GORONTALO	7.569.060.033	52.675.754.956	56.750.823.456	116.995.638.445	4,40	50,34	1.339.114.447.889
KOTA GORONTALO	8.441.750.202	424.359.155.607	75.640.509.379	508.441.815.188	19,11	38,27	1.017.895.496.027
KABUPATEN GORONTALO UTARA	193.669.130.204	6.528.954.672	15.959.544.449	216.157.629.495	8,13	6,56	174.401.722.438
KABUPATEN BONE BOLANGO	50.659.986.655	117.459.719.864	102.315.893.334	270.435.599.853	10,17	3,35	89.202.330.842
KABUPATEN BOALEMO	828.100.000	373.000.000	12.189.900.000	13.391.000.000	0,50	1,25	32.328.309.233
KABUPATEN POHUWATO	230.886.707.245	206.065.810.644	148.970.554.996	585.923.152.885	22,03	0,27	7.057.692.770
JUMLAH =	492.054.814.419	807.462.395.743	411.827.625.614	1.711.344.835.776	64,34	100	2.660.000.000.000

Sekretaris Dinas PMESDM-TRANS Gorontalo, Uga Biki menyampaikan data terjadi penurunan signifikan nilai investasi sebesar 51% dimana pada Triwulan II-2022 nilai investasi mencapai sebesar 807,4 milyar rupiah dan pada TW III 2022 menjadi 411,8 milyar rupiah (Singgih, 2007). Apabila dibandingkan dengan target investasi tahun 2022 sebesar 2,66 trilyun rupiah, realisasi investasi baru mencapai 64,34%. Penurunan investasi ini tentunya juga akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Nampaknya, dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global menyebabkan investor menahan diri untuk melakukan investasi. Hal ini dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja / lapangan usaha.

H. Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui APBN dan APBD.

Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang secara nasional maupun regional didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang diikuti campur tangan pemerintah dalam bentuk belanja (Udayana, Hidayat, Yuniati, Meilana, & Putri, 2022). Apabila tidak ada campur tangan pemerintah maka aktivitas ekonomi akan membawa dampak yang besar. Campur tangan pemerintah dilakukan melalui APBN dan APBD.

Total pagu anggaran belanja pemerintah (fiskal) di Gorontalo tahun 2022 mencapai Rp12,06 triliun, terdiri dari pagu belanja APBD sebesar Rp8,1 triliun dan APBN sebesar Rp4,06 triliun. Dilihat dari proporsinya, nilai APBD jauh lebih besar daripada porsi APBN. Nilai pagu belanja pada tahun 2022 tersebut terkontraksi 7,39% (yoy) atau berkurang Rp964,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pagu belanja terjadi pada semua pagu anggaran belanja, baik APBD maupun APBN. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk beradaptasi kembali menuju kondisi normal APBN pasca pandemi COVID-19 yang memungkinkan defisit melebihi 3% dari PDB. Dengan penurunan pagu belanja pemerintah maka akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut ([Tingkat Kemiskinan di Indonesia, n.d.](#)) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional didominasi oleh rumah tangga yang diikuti campur tangan pemerintah dalam bentuk belanja. Apabila tidak terdapat campur tangan pemerintah maka hanya akan ada sedikit kekayaan yang akan diakumulasi oleh aktivitas ekonomi. Menjadi penting pemerintah mendorong belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga apabila pengeluaran pemerintah sangat kecil, pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas karena kesulitan dalam penyediaan barang publik. Oleh karena itu, tingkat optimalisasi pengeluaran pemerintah yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah hal sangat krusial. ([Asimakopoulos & Karavias, 2016](#))

Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional, maka APBN berperan sebagai shock absorber (peredam guncangan ekonomi) yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural ([Arham, 2020](#)). Kluster perlindungan sosial (perlinsos) merupakan salah satu kluster dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN yang dirancang untuk menjaga masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program perlinsos antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako, Bansos Tunai (BST), bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah juga menganggarkan dalam APBN program dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan ([Madalina, Laxamana, & Aldian, n.d.](#)).

Dengan paket bantuan tersebut, diharapkan UMKM mampu bertahan dan kembali mendorong roda perekonomian nasional. Untuk para pekerja/buruh juga dicairkan bantuan subsidi upah (BSU). Selain itu, terdapat pula Program Padat Karya di sejumlah K/L yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian daerah setempat, antara lain tampak dari realisasi dan serapan tenaga kerja yang cukup besar ([Sulaeman & Silvia, 2019](#)).

Selanjutnya, di dalam APBN terdapat fungsi-fungsi yang perlu dijalankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sesuai Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dengan banyaknya fungsi yang dijalankan melalui APBN, maka kontribusi APBN dalam memberikan pertumbuhan ekonomi di daerah sangat besar. Apalagi bagi daerah yang porsi pembiayaan APBN nya sangat dominan. APBN menjadi indikator utama dalam pergerakan roda perekonomian di negara Indonesia. APBN menjadi alat untuk menurunkan kesenjangan dari segi ekonomi-sosial supaya pemerataan semakin tercapai. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi juga selalu dihubungkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ([Olson, 1998](#)). Menurut ([Mankiw, 2020](#)), Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Begitu sebaliknya, jika pengeluaran Pemerintah sangat kecil, pertumbuhan ekonomi sangat terbatas, karena kesulitan dalam penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu, tingkat optimalisasi pengeluaran pemerintah yang

memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat krusial ([Asimakopoulos & Karavias, 2016](#)).

KESIMPULAN

Pada triwulan III tahun 2022, dampak krisis ekonomi global sudah terasa di Provinsi Gorontalo. Namun demikian dampak tersebut belum sebesar yang terjadi pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena interaksi kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo dengan perdagangan internasional tidak sebesar daerah yang memiliki sistem ekonomi terbuka. Untuk itu menjadi penting untuk memitigasi potensi resesi ekonomi harus diantisipasi sejak awal ([Ibrahim, 2018](#)).

Penguatan peran Bank Indonesia sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas moneter, dan juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. Bank Indonesia perlu terus melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai kebijakan penyesuaian suku bunga acuan.

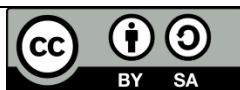
Sinergitas antara Kanwil DJPb, Satker Kementerian Negara / Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran perlu terus ditingkatkan. Upaya mendorong belanja pemerintah untuk mewujudkan spending better dan faster sangat penting dilakukan. Melalui monitoring dan evaluasi on going atas pelaksanaan belanja pemerintah, diharapkan upaya maksimal untuk dapat mendorong penyerapan anggaran dapat dilakukan ([Stewart & Walsh, 1992](#)).

Dalam rangka membantu UMKM untuk mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi global, Kanwil DJPb dan Pemerintah Daerah perlu mendorong UMKM untuk dapat masuk dalam e-Katalog yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Hal ini penting untuk meningkatkan transaksi perdagangan daerah agar produk unggulan lokal dikenal luas secara nasional. Selanjutnya, perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku usaha terutama UMKM tentang tata cara ekspor. Upaya produktif lain yang perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan melakukan pasar murah produk UMKM. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional Gorontalo ([Siwu, 2019](#)).

DAFTAR PUSTAKA

- [Arham, Muhammad Amir. \(2020\).](#) *Perekonomian Gorontalo: Perkembangan, Agenda Dan Tantangan Ke Depan*. Deepublish.
- [Asimakopoulos, Stylianos, & Karavias, Yiannis. \(2016\).](#) The Impact Of Government Size On Economic Growth: A Threshold Analysis. *Economics Letters*, 139, 65–68.
- [Di Indonesia, Tingkat Kemiskinan. \(N.D.\).](#) Pengeluaran Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 103.
- [Ibrahim, Ismail. \(2018\).](#) Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016). *Gorontalo Development Review*, 1(1), 44–58.
- [Indonesia, Pemerintah Republik. \(2004\).](#) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. *Jakarta (Id): Sekretariat Negara*.
- [Madalina, Maria, Laxamana, M. R. F. Izzata, & Aldian, Kaharudin. \(N.D.\).](#) Penegakan Hukum Progresif Dalam Perkara Judicial Review: Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Majelis*, 1.

- [Mankiw, N. Gregory. \(2020\). *Principles Of Macroeconomics*. Cengage Learning.](#)
- [Olson, Leanne Marzocco. \(1998\). *The Assessment Of Moral Integrity Among Adolescents And Adults*. The University Of Wisconsin-Madison.](#)
- [Singgih, Mohamad Nur. \(2007\). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah \(Umkm\) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3\(3\), 218–227.](#)
- [Siwu, Hanly Fendy Djohar. \(2019\). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18\(6\).](#)
- [Stewart, John, & Walsh, Kieron. \(1992\). Change In The Management Of Public Services. *Public Administration*, 70\(4\), 499–518.](#)
- [Sulaeman, Agus Sunarya, & Silvia, Vivin. \(2019\). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4\(1\), 97–112.](#)
- [Tufa, Nun. \(2018\). Pentingnya Pengembangan Sdm. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4\(2\).](#)
- [Udayana, Ketut Arya, Hidayat, Alfie Satria, Yuniati, Sani Andina, Meilana, Briliana Cahya, & Putri, Chynika Salsabillah. \(2022\). Relevansi Skala Optimum Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Financial Distress Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3\(1\), 71–89.](#)
- [Wiarta Trilaksana, Muhammad Fatahillah A. \(N.D.\). *Merugikan Perekonomian Negara Berdasarkan Asas Lex Specialis*.](#)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).